

# ANALISIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN TORAJA UTARA

*Analysis Of Institutional Governance In Social Forestry Management In North Toraja Regency*

<sup>1\*</sup>Teguh Bimantara, <sup>2</sup>Andi Khairil A. Samsu, <sup>3</sup>Hasanuddin

## Affiliation

1. Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat.
2. Jurusan Kehutanan, Fakultas Fakultas Pertanian, Kehutanan Dan Peternakan. Universitas Muslim Maros
3. Pendamping Desa Program YAKU – Payo-Payo

\*Corresponding author:

teguh.bimantara@unsulbar.ac.id

## Abstract

*This research on social forestry focuses on institutional and governance aspects as both elements play a key role in the success of sustainable forest resource management. Strong institutions and good governance ensure active participation of local communities in decision-making, regulation of access rights, and fair and transparent management of forest resources. This study aims to evaluate the management of Community Forest (HKm) in North Toraja Regency with a focus on institutional and business aspects. Data collection was conducted through observation, structured interviews, and examination of institutional documents in three Forest Farmer Groups (KTH), namely Tambuntana, Tombang Riri, and Sipaelle. The sampling technique used purposive sampling and quota sampling methods. The results showed that the planning and institutional aspects were in the good category, with average scores of 110.0 and 109.5 respectively. However, other obligations such as the preparation of annual reports were classified as poor with a score of 39.1, indicating a lack of attention to documentation of activities. Community empowerment scored moderately well (46.0), which was influenced by the suboptimal role of Forest Management Unit extension workers in training and marketing Non-Timber Forest Products. The business governance aspect was also categorized as quite good (87.6), supported by the existence of a group business structure, but constrained by a lack of training and market access. Supporting factors for HKm management the existence of planning documents, the desire to preserve the forest, and assistance from the government. Meanwhile, inhibiting factors include the lack of member involvement, limited human resources, and not optimal government support in marketing Non-Timber Forest Products. Overall, the performance of community forest management in the three forest farmer groups is in the good category, but needs improvement in the aspects of administrative obligations and community empowerment.*

Submit 2025-03-25

Accepted 2025-05-31

COPYRIGHT © 2025 by Journal Eboni.

This Work is licenced under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Keywords

*Social Forestry, Community Forest, Governance, Institutionalization*

## 1. Pendahuluan

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, penyediaan jasa ekosistem, serta menjadi penopang kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan (FAO, 2020). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia semakin meningkat akibat konversi lahan, eksploitasi yang tidak berkelanjutan, serta lemahnya kontrol terhadap kawasan hutan negara. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mendorong pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial, salah satunya melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm) (KLHK, 2016).

Program HKm memberikan hak akses kepada kelompok masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara legal dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian hutan, dan memperkuat posisi kelembagaan lokal (Maryudi, 2012). Namun, kenyataannya, keberhasilan implementasi HKm sangat bervariasi antar wilayah. Salah satu faktor penentu keberhasilan adalah sejauh mana tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha dapat berjalan secara efektif dan sinergis (Siscawati, 2017).

Tata kelola kelembagaan dalam konteks HKm mencakup struktur organisasi kelompok tani hutan (KTH), mekanisme pengambilan keputusan, peran aktor-aktor lokal, transparansi dan akuntabilitas, serta hubungan antar kelembagaan seperti Dinas Kehutanan/ Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), LSM/NGO, dan mitra usaha lainnya. Tata kelola yang baik mencerminkan adanya distribusi peran yang adil, partisipasi aktif masyarakat, serta keberlanjutan kelembagaan dalam jangka Panjang (Wulandari, 2018). Sementara itu, tata kelola usaha mencakup manajemen produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK), akses pasar, pengelolaan keuangan kelompok, serta penguatan kapasitas bisnis masyarakat (Sari, 2019).

Kabupaten Toraja Utara merupakan wilayah yang secara geografis dan sosiokultural memiliki potensi besar dalam pengembangan HKM. Masyarakat adat Toraja dikenal memiliki hubungan yang erat dengan alam serta kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan. Di sisi lain, potensi hutan yang masih cukup luas dapat menjadi aset penting dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis hutan. Namun, hingga saat ini masih ditemukan tantangan dalam bentuk keterbatasan kapasitas kelembagaan KTH, lemahnya pendampingan teknis, serta belum optimalnya pengelolaan usaha hasil hutan secara professional (Dishut Prov Sulsel, 2022).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pengelolaan HKM di Kabupaten Toraja Utara dari aspek kelembagaan dan aspek usaha. Aspek kelembagaan dan aspek usaha merupakan hal yang memegang peranan penting dalam pengelolaan HKM. Hakim et al. (2010) menyebutkan Aspek kelembagaan menjadi penting dalam rencana pemberdayaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan. Aspek usaha memiliki peranan penting dalam tujuan pengelolaan HKM yang ingin mensejahterahkan masyarakat disekitar kawasan hutan yang ikut mengelola kawasan secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berada disekitar kawasan hutan akan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Keberadaan HKM diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat disekitar kawasan hutan sehingga masyarakat sejahtera dan hutan dapat terus lestari.

Menurut Permen LHK No. 9 Tahun 2021 HKM merupakan hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat yang izin pengelolaannya diberikan selama kurun waktu 35 tahun. Dengan kurun waktu tersebut pengelola HKM wajib melakukan monitoring pengelolaan selama satu tahun sekali serta melakukan evaluasi secara berkala selama lima tahun sekali. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan guna memperoleh data dan hasil sejauh mana kemajuan dari pengelolaan HKM berdasarkan Izin/Persetujuan Perhutanan Sosial yang telah diterbitkan. Sehingga hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan mampu membantu pengelola dalam menentukan arah pengelolaan yang lebih baik dari sebelumnya serta dapat menentukan apakah Izin/Persetujuan Perhutanan Sosial selanjutnya dapat diperpanjang atau tidak. Sudarsono (2016) menyatakan evaluasi pengelolaan HKM dapat dilakukan oleh pihak pemberi izin setiap satu tahun sekali.

Dalam prosesnya, pengelolaan HKM di Kabupaten Toraja Utara tentu saja memiliki hambatan ataupun permasalahan yang dihadapi selama proses pengelolaan HKM berlangsung. Oleh karena itu, selain memperoleh hasil evaluasi dari aspek kelembagaan dan aspek usaha, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan saran atau masukan terkait permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan HKM. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Tata Kelola Kelembagaan Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Kabupaten Toraja Utara".

## 2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2025. Penelitian dilakukan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah keterangan responden dari hasil wawancara dan total skoring dari Instrument Monev. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait pengelolaan HKM. Adapun variabel yang diukur dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Tata Kelola Kelembagaan (Perencanaan, Kelembagaan, Kewajiban lain, dan Pemberdayaan Masyarakat)
- Tata Kelola Usaha
- Faktor Pendukung dan Penghambat

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung, wawancara menggunakan pedoman atau instrumen tertentu, serta telaah terhadap dokumen kelembagaan yang berkaitan. Penentuan responden menggunakan kombinasi teknik *purposive sampling* dan *quota sampling*. *Purposive sampling* dipilih karena memungkinkan peneliti menetapkan kriteria tertentu dalam pemilihan responden. Dalam hal ini, responden yang diwawancarai dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria: mereka harus merupakan pengurus aktif di Gapoktan Mertesari serta terlibat secara rutin dalam kegiatan kelompok, termasuk pertemuan dan pengelolaan lahan HKM.

Sementara itu, *quota sampling* digunakan untuk memastikan jumlah responden sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan proporsi tertentu dari populasi. Populasi yang dimaksud mengacu pada total anggota kelompok tani hutan yang mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), sebagaimana tercantum dalam tabel 1 jumlah anggota kelompok tani hutan pengelola HKm. Pemilihan jumlah responden pada masing-masing kelompok didasarkan pada proporsi keterwakilan dan karakteristik yang relevan untuk mencapai kuota yang telah direncanakan (Sugiyono, 2014).

**Tabel 1.** Jumlah Anggota Kelompok Tani Hutan Pengelola Hutan Kemasyarakatan

No	Nama Kelompok Tani Hutan	Jumlah Anggota (Orang)
1.	Tambuntana	48
2.	Tombang Riri	34
3.	Sipaelle	18
Total		100

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2025.

Pemakaian *sampling* kuota digunakan untuk menentukan jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini. Oleh karena itu, maka dari jumlah populasi 100 orang dipilih perwakilan pengurus dari masing-masing sub kelompok yang berjumlah 3 orang yang berstatus sebagai pengurus kelompok. Selanjutnya dari pengurus sub kelompok tersebut diperoleh informasi anggota yang dianggap aktif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya sehingga jumlah anggota yang akan diwawancarai adalah sejumlah 7 orang anggota aktif. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui jumlah responden keseluruhan dalam penelitian ialah sebanyak 30 orang.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh berdasarkan dari pedoman monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PHBM oleh Suwarsono (2016). Data yang terkumpul selanjutnya ditabulasi dan dianalisis untuk mendapatkan ukuran evaluasi yang didasarkan pada sistem scoring, yaitu dilaksanakan pada bobot masing-masing aspek secara berimbang sesuai jumlah pertanyaan dalam kuesioner. Hasil penilaian skoring dari 5 sub variabel selanjutnya dapat dilakukan penilaian umum evaluasi HKm berdasarkan kriteria yang diadaptasi dari panduan Monev Sudarsono (2016) sehingga menghasilkan kategori nilai pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2.** Kategori Nilai Panduan Monev PS

No	Kriteria	Kisaran Nilai	Kategori Nilai				
			Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1.	Perencanaan	0–150	121-150	91-120	61-90	31-60	0-3-
2.	Tata Usaha Kelompok	0–200	161-200	121-160	81-120	41-80	0-40
3.	Kelembagaan	0–175	141-175	106-140	71-106	36-70	0-35
4.	Kewajiban Lain	0–100	81-100	61-80	41-60	21-40	0-20
5.	Pemberdayaan Masyarakat	0-100	81-100	61-80	41-60	21-40	0-20
<b>Kisaran Nilai Total</b>		0-725	585-725	220-580	295-495	150-290	0-145

Sumber: Sudarsono, 2016.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil Evaluasi Aspek Kelola Kelembagaan

Pada tahun 2020, cikal bakal kelompok masyarakat terbentuk melalui sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan pada masing-masing lembang yang dihadiri oleh beberapa perwakilan pemerintah lembang serta dihadiri oleh masyarakat yang terdiri dari pengelola Kawasan hutan dalam hal ini yang memiliki lahan Kelola dalam Kawasan hutan, kelompok perempuan, kelompok rentan dalam hal ini yang telah dalam status janda/duda. Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan” yang dimana program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh KAPABEL atau Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim”. Konsorsium KAPABEL adalah konsorsium yang terdiri beberapa elemen Lembaga yang saling bersinergi. Lembaga tersebut diantaranya adalah TLKM, YAKU, Lembaga Penelitian Unhas, Bumi Lestari dan Kanopi Hijau. Adapun kegiatan-kegiatan yang nantinya dilaksanakan diantaranya adalah pembentukan Kelompok

Tani Hutan, penanaman pada Kawasan hutan. Dari program inilah sehingga akhirnya terbentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengelola Izin/Persetujuan Perhutanan Sosial sesuai dengan tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Data KTH Pengelola HKm di Toraja Utara

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Nomor SK	Jumlah Anggota (Orang)	%
1.	Tambuntana	Markus Lambung	SK.8584/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021	48	48 %
2.	Tombang Riri	Marthen Duma	SK.8584/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021	34	34 %
3.	Sipaelle	M. Dominggus Rahing	SK.8584/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021	18	18 %
Total				100	100%

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2025.

#### 1. Perencanaan

Variabel perencanaan dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator yaitu: (1) ketersediaan data biofisik, potensi HHBK, jasa lingkungan untuk bahan penyusunan RKPS dan RKT, (2) ketersediaan dokumen RKPS dan RKT, (3) adanya keterlibatan pengurus, anggota, pengelola HKm, perempuan dan stakeholder terkait dalam menyusun RKPS dan RKT. Hasil evaluasi pengelolaan HKm untuk variabel perencanaan dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4.** Hasil Analisa Data Variabel Perencanaan

No	Indikator	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian
1.	Ketersediaan Data Biofisik, Potensi HHBK, Jasa Lingkungan untuk bahan penyusunan Dokumen RKPS dan RKT	0 - 50	40
2.	Ketersediaan Dokumen RKPS dan RKT	0 - 50	40
3.	Adanya keterlibatan pengurus, anggota, perempuan dan stakeholder dalam menyusun dokumen RKPS	0 - 50	30
Nilai Total		0 - 150	<b>110</b>
Kriteria Penilaian		Baik	

Sumber: Data Primer, 2025.

Setelah dilakukan analisis data, variabel perencanaan memperoleh nilai total 110 dan masuk dalam kategori penilaian Baik karena berada dalam rentang nilai antara 91-120. Hal ini diperoleh berdasarkan proses pengambilan data yang telah dilakukan terhadap responden serta pemeriksaan dokumen masing-masing KTH terkait penelitian. terkait pengelolaan HKm. Diketahui bahwa Kelompok HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle memiliki data biofisik kawasan, potensi HHBK. Untuk potensi jasa lingkungan memang belum ada karena jasa lingkungan yang ada di masing-masing kelompok HKm belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, namun diakui oleh pengurus kedepannya potensi jasa lingkungan yang ada di HKm akan mulai dikembangkan.

Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dua komponen penting yang terkait satu sama lain dalam pengelolaan hutan khususnya HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Permen LHK No.9 tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perhutanan Sosial merupakan rencana pemanfaatan HKm yang menjamin kelestarian hutan. RKPS memuat kegiatan penataan hutan yang meliputi penataan areal kerja, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pengembangan usaha dan rencana perlindungan. Hal ini sesuai juga dengan yang ada pada HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Dalam dokumen RKPS HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle terdiri mulai dari kondisi umum kawasan hingga data potensi kawasan. Dokumen RKPS HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle berlaku selama 35 tahun sekali (sesuai dengan masa Izin/Persetujuan Perhutanan Sosial) dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen RKT juga memiliki fungsi yang sama namun berbeda

dalam proses penyusunannya. Dokumen RKT disusun setiap lima tahun sekali selama Izin/Persetujuan PS masih berjalan. Dokumen RKPS/RKT dapat disusun oleh semua pengurus dan anggota HKm termasuk perempuan. Namun dalam penyusunan dokumen pada KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle hanya pengurus-pengurus dan beberapa anggota yang aktif saja yang terlibat.

## 2. Keberhasilan Kelembagaan

Menurut Mulyana (2001) dalam Puspita (2006), terdapat empat kriteria utama yang menentukan seseorang dapat menjadi anggota kelompok tani hutan, yaitu kedekatannya secara geografis dengan kawasan hutan, hak atas sumber daya yang telah dimiliki sebelumnya, tingkat ketergantungan terhadap hutan, serta penguasaan pengetahuan lokal. Keempat aspek ini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan, serta mudah diidentifikasi dalam konteks sosial-ekologis masyarakat sekitar hutan. Kriteria tersebut tercermin dalam keanggotaan kelompok tani hutan di wilayah Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle, di mana mayoritas anggota tinggal di sekitar kawasan hutan, memiliki keterikatan historis dengan lahan, serta menggantungkan kebutuhan ekonomi pada hasil hutan. Hal ini selaras dengan temuan dalam Tabel 5, yang menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan kelompok tani hutan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif anggota yang memiliki kedekatan fisik maupun sosial dengan kawasan hutan. Indikator-indikator dalam variabel keberhasilan kelembagaan yang telah dianalisis disajikan pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5.** Hasil Analisa Data Variabel Keberhasilan Kelembagaan

No.	Indikator	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian
1.	Adanya Dokumen Nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok	0 - 25	25
2.	Adanya Penjelasan Peran setiap pengurus	0 - 25	20
3.	Adanya Aturan Kelompok (AD/ART)	0 - 25	20
4.	Adanya Pergantian Pengurus	0 - 25	16,30
5.	Adanya Pertemuan Pengurus	0 - 25	11,09
6.	Adanya Capaian Kegiatan Penguatan Kelembagaan sesuai RKPS/RKT	0 - 50	13,70
7.	Kelengkapan Administrasi Kelompok Lainnya (Pendukung)	0 - 50	3,48
Nilai Total		0 - 175	109,57
Kriteria Penilaian		Baik	

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, kriteria keberhasilan kelembagaan memperoleh total nilai rata-rata sebesar 109.57 dan masuk kedalam kategori Baik karena berada dalam rentang nilai total antara 106-140. Hampir semua indikator yang ada dalam variabel keberhasilan kelembagaan memiliki nilai yang sempurna. Karena berdasarkan proses penelitian yang sudah dilakukan, kelompok tani hutan HKm memang memiliki dokumen-dokumen terkait penilaian keberhasilan kelembagaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Nandini (2013) dimana untuk aspek kelembagaan HKm yang ada di Pulau Lombok berada dalam kategori tidak baik, hal ini disebabkan oleh pendampingan HKm hanya dilakukan pada awal kegiatan dan dilepas ketika kelembagaan HKm belum dapat mandiri. Kurangnya sumberdaya manusia yang tepat sebagai pengurus kelembagaan menjadi faktor penambah ketidakberhasilan kelembagaan HKm yang ada di Pulau Lombok.

Faskalis (2011) dalam Sanjaya et al. (2017) menyatakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok Hkm sangat menjunjung tinggi musyawarah antar sesama anggotanya. Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan cukup tinggi, ini artinya seluruh anggota dalam kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan kinerja kelompoknya, selain itu untuk menjalankan roda organisasi dan untuk memperkuat kelompok, dalam mengelola HKm dibuat aturan main kelompok yang tercantum dalam AD/ART.

Hal-hal mengenai penjelasan peran atau tugas setiap pengurus, aturan kelompok atau awig-awig kelompok semua telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Dalam AD/ART juga disebutkan bahwa pertemuan pengurus KTH HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle dilaksanakan setiap bulan atau selambat-lambatnya setiap dua bulan sekali. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden penelitian. Biasanya dalam pertemuan tersebut, pengurus membahas terkait kegiatan yang tengah dilakukan oleh setiap kelompok dikawasan HKm, mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait pengelolaan kawasan hingga harapan setiap pengruus untuk kemajuan pengelolaan HKm KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Sedangkan untuk rapat seluruh anggota KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle dilaksanakan setiap satu kali dalam setahun.

Anggota KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle diwajibkan hadir dalam pertemuan masing-masing KTH. Karena dalam pertemuan tahunan akan dibahas agenda apa yang akan.

### 3. Kewajiban Lain

Variabel kewajiban lain dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator yaitu: (1) adanya dokumen laporan tahunan kemajuan HKm, dan (2) proses penyusunan laporan tahunan kemajuan HKm. Hasil evaluasi pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. untuk hasil Analisa variabel kewajiban lain dapat di lihat pada tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6.** Hasil Analisa Data Variabel Kewajiban Lain

No.	Indikator	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian
1.	Adanya Dokumen Laporan Tahunan (Kemajuan KTH)	0 - 50	19,57
2.	Proses Penyusunan Laporan Tahunan (Kemajuan KTH)	0 - 50	19,57
Nilai Total		0 - 150	39,14
Kriteria Penilaian		Kurang Baik	

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, variabel kewajiban lain dari evaluasi pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle memperoleh rata-rata nilai total dengan jumlah 39,14 dan masuk kedalam kategori kurang baik karena berada dalam rentang nilai total antara 21-40. Hal ini dapat terjadi karena perhatian kelompok tani hutan terhadap kewajiban lain menyangkut pengelolaan HKm seperti penyusunan laporan kegiatan pengelolaan yang seharusnya dilakukan selama satu tahun sekali masih belum maksimal dilakukan.

Perhatian responden dari ketiga KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle terhadap kewajiban lain terkait pengelolaan HKm seperti penyusunan dokumen laporan tahunan kemajuan HKm masih kurang. Terlihat bahwa ketiga kelompok ini mengakui belum pernah menyusun dokumen laporan kemajuan pengelolaan HKm. Mereka mengakui bahwa selama ini mereka hanya fokus terhadap pengelolaan kawasan tanpa memikirkan kewajiban lain seperti menyusun dokumen laporan kemajuan. Hal yang sama dikemukakan oleh Sanjaya et al. (2017) meskipun dalam aspek yang berhubungan dengan kewajiban kelompok masih kurang dipahami oleh masyarakat, namun mereka selalu mengupayakan pengelolaan di lahan mereka secara baik karena dengan adanya program HKm tersebut masyarakat secara langsung dapat memperoleh manfaatnya seperti adanya peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan produktivitas lahan, dan masyarakat dapat menjaga sistem ekologi hutan secara baik melalui kegiatan. Hasil Analisa mengenai variabel pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7.** Hasil Analisa Data Variabel Pemberdayaan Masyarakat

No.	Indikator	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian
1.	Adanya Fasilitas Penyusunan RKPS dan RKT dari Dinas Atau Instansi Terkait (Lembaga Lainnya)	0 - 50	20
2.	Adanya Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan dari Dinas/Lembaga lainnya dalam kurun waktu satu tahun terakhir	0 - 20	8
3.	Adanya Pendampingan rutin dari Dinas/Lembaga Lainnya	0 - 20	12,70
4.	Adanya Dokumen Anggaran dari Dinas/Lembaga Lainnya terkait program pemberdayaan	0 - 20	3,65
5.	Adanya Fasilitas Pemerintah dalam pemasaran produk HHBK	0 - 20	1,74
Nilai Total		0 - 100	46,09
Kriteria Penilaian		Cukup Baik	

Setelah dilakukan proses evaluasi dan analisa data, variabel pemberdayaan masyarakat memperoleh total nilai rata-rata sejumlah 46,09 dan masuk kedalam kriteria cukup baik karena

berada dalam rentang nilai total antara 21-40. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden, bimbingan dari pemerintah dalam hal ini melalui penyuluh KPH cukup baik. Penyuluh ikut memfasilitasi anggota/pengurus HKm dalam proses penyusunan RKPS/RKT hingga hal-hal lain terkait pengelolaan HKm. Penyuluh KPH juga rutin selama satu bulan sekali mengunjungi pengurus HKm. Pada saat rapat pertemuanpun penyuluh KPH selalu ikut hadir. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah (penyuluh KPH) dalam kegiatan pengelolaan HKm cukup baik. Namun yang menjadi permasalahan disini ialah responden mengakui bahwa selama ini pemerintah atau instansi terkait belum pernah lagi melaksanakan pelatihan atau bimbingan khusus terkait pengelolaan hutan kepada masyarakat, selain itu masyarakat berharap pemerintah ikut mendukung dalam proses pemasaran HHBK karena selama ini pemerintah atau instansi terkait belum pernah memfasilitasi pengurus atau anggota dalam proses pemasaran HHBK di HKm. Sedangkan menurut Sanjaya (2017) kegiatan pemantauan dari Dinas Kehutanan dalam hal ini KPH sangat perlu dilakukan secara langsung ke lahan kelola masyarakat hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan Hkm, selain monitoring dari Dinas Kehutanan/KPH perlu juga adanya monitoring dari lembaga Non Dinas seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

### 5. Aspek Kelola Usah

Pemanfaatan HHBK merupakan salah satu komoditi andalan pengelola HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle dalam hal kelola usaha. Keberadaan HHBK dikawasan HKm ini menjadi salah satu sumber pendapatan anggota tani HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle sehari-hari. Biasanya petani HKm mengambil HHBK dari kawasan PS untuk langsung dijual ke pengumpul atau langsung dijual ke pasar. Petani lebih banyak memilih menjual HHBK ke pengumpul karena akses yang lebih dekat dan dapat terjual dalam waktu lebih cepat diikuti oleh kesepakatan harga antar penjual dan pengumpul. Berbeda apabila menjual HHBK ke pasar, petani menganggap proses tersebut lebih lama dan akses menuju pasar yang jauh dari kawasan. Hal ini didukung juga oleh penelitian Sanjaya (2017) bahwa kegiatan pemasaran hasil hutan bukan kayu yang dilakukan oleh masyarakat biasanya menggunakan saluran pemasaran terpendek yaitu dari produsen-pengumpul-konsumen, hal ini karena menjual ke pasar perlu kendaraan untuk mengangkut hasil panen dan masyarakat juga tidak ingin menerima resiko bila hasil panen tersebut tidak laku dijual. Sehingga sebagian besar masyarakat menjual hasil panen ke pengumpul untuk mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan.

HHBK yang diperoleh dari kawasan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle dapat berupa Kopi, Madu, Pinus dan HHBK lainnya. Adapun yang menjadi HHBK unggulan di kawasan HKm ialah Kopi. Umumnya petani menjual HHBK dalam bentuk mentah (tidak diolah), namun apabila HHBK begitu melimpah dan tidak memiliki nilai yang berarti apabila dijual. Sayangnya kegiatan pengolahan HHBK dari bahan mentah menjadi bahan jadi sekarang tidak berjalan secara optimal. Nandini (2013) menyebutkan salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kurangnya dampak ekonomi HKm adalah melibatkan instansi terkait seperti perindustrian maupun koperasi usaha untuk memberikan pelatihan kewirausahaan agar para petani mempunyai pendapatan tambahan dari produk-produk yang dihasilkan HKm. Untuk melihat sejauh mana analisa aspek kelola usaha pada KTH dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8.** Hasil Analisa Data Aspek Tata Kelola Usaha

No.	Indikator	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian
1.	Adanya Pengurus KTH yang bertanggung jawab pada bidang Usaha	0 - 25	10
2.	Adanya pertemuan rutin KTH	0 - 25	6,30
3.	Adanya kegiatan pelatihan penguatan usaha KTH	0 - 25	11,30
4.	Adanya iuran anggota KTH	0 - 25	10
5.	Adanya Modal Kelompok untuk dana usaha	0 - 25	10
6.	Adanya produk pasca panen	0 - 25	25
7.	Adanya jaringan pasar hasil produksi	0 - 25	15
8.	Adanya sumbangan sisa hasil usaha ke KTH	0 - 25	0
Nilai Total		0 - 200	87,6
Kriteria Penilaian		Cukup Baik	



Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi dan analisa data terkait pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle, kinerja pengelolaan HKm memperoleh nilai total rata-rata sebesar 392,39 dan masuk kedalam kriteria baik dengan rincian hasil penilaian variabel perencanaan sebesar 110 (baik), variabel kelembagaan sebesar 109,57 (Baik), kewajiban lain sebesar 39,13 (kurang baik), pemberdayaan masyarakat sebesar 46,09 (cukup baik) dan tata kelola usaha sebesar 87,61 (cukup baik).

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle

Keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) khususnya di kawasan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung kegiatan pengelolaan kawasan HKm maupun faktor yang dapat menghambat kegiatan pengelolaan kawasan HKm sehingga tidak dapat berjalan dengan maksimal. Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle.

- Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan salah satu faktor utama yang membuat pengelola HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle ingin terus dan tetap mengelola kawasan. Keberadaan faktor pendukung menjadi elemen penting bagi masyarakat dalam mengelola dan menjaga kawasan HKm. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, responden mengakui bahwa tanpa adanya faktor pendukung pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle pasti tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun faktor pendukung pengelolaan HKm terdapat dalam Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Faktor Pendukung Pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle.

No.	Variabel	Faktor Pendukung	Jumlah Responden Yang Menjawab
1.	Perencanaan	- Adanya Persetujuan/Izin PS	23
		- Adanya RKPS/RKT yang menjadi pedoman dalam pengelolaan HKm	13
2.	Keberhasilan Kelembagaan	- Adanya Pengurus KTH sebagai sebagai pengelola inti	10
		- Adanya pertemuan rutin KTH	13
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Adanya dukungan dari instansi (Dinas Kehutanan/KPH,) atau Lembaga Lainnya	10
4.	Tata Kelola Usaha	- Adanya bantuan dari berbagai pihak (Dishut/KPH, Lembaga lainnya)	15
		- Adanya sumber pendapatan utama	13
5.	Lain-Lain	- Adanya Tujuan ingin menjaga hutan	20
		- Adanya bantuan bibit	25
		- Tidak memiliki lahan garapan lain	20

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 9 tersebut dapat diketahui faktor pendukung pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle berdasarkan variabel perencanaan yaitu adanya Izin/Persetujuan PS, adanya RKPS/RKT sebagi pedoman dalam pengelolaan HKm. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat adanya dukungan instansi (DISHUT/KPH dan LSM). Faktor pendukung tata kelola usaha yaitu adanya bantuan dari berbagai pihak dan sumber pendapatan utama. Serta faktor pendukung lainnya antara lain keinginan untuk menjaga hutan, adanya bantuan bibit dari pemerintah dan tidak memiliki lahan garapan lain kecuali lahan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Kenyataan bagi masyarakat di sekitar hutan yang menjadikan kawasan hutan sebagai salah satu sumber mata pencaharian merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi. Bahkan sebagian dari masyarakat di sekitar hutan menjadikan kawasan hutan sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian sehingga tingkat ketergantungan mereka akan keberadaan hutan sangat tinggi.

Salah satu faktor pendukung pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle ialah keinginan untuk menjaga hutan yang besar. Mereka beranggapan bahwa hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang harus terus dijaga kelestariannya. Mereka percaya bahwa apabila hutan rusak, hutan tidak jaga. Kehidupan umat manusia akan terancam. Karena hutan memiliki sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti air, udara dan bahan makanan maupun obat-obatan.

• Faktor Penghambat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan teridentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Responden mengakui walaupun dalam praktiknya kegiatan pengelolaan HKm terlihat cukup baik, namun kenyataannya sebagian dari mereka merasa ada beberapa hal yang masih sangat diperlukan dalam pengelolaan kawasan yang belum mereka miliki dan menjadi penghambat dalam pengelolaan kawasan sehingga tidak dapat berjalan dengan sangat baik. Faktor penghambat pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle dapat dilihat dalam Tabel 10 berikut ini:

**Tabel 10.** Faktor Penghambat Pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle

No.	Variabel	Faktor Penghambat	Jumlah Responden Yang menjawab
1.	Perencanaan	- Anggota Kurang berperan aktif dalam penyusunan RKPS/RKT (hanya pengurus inti saja)	10
		- Kurang lengkapnya data pendukung dalam penyusunan dokumen RKPS/RKT	7
2.	Keberhasilan Kelembagaan	- Kurangnya SDM untuk regenerasi Pengurus KTH	8
3.	Kewajiban lain	- Tidak memiliki pengetahuan (Skill) dalam hal penyusunan laporan	13
		- Fokus pada pengelolaan lahan saja	10
4.	Pemberdayaan masyarakat	- Penyuluh jarang mengunjungi KTH karena aksesibilitas	12
5.	Tata Kelola Usaha	- Kurangnya pelatihan dari pemerintah dalam hal pengelolaan HHBK	9
		- Tidak ada dukungan pemasaran HHBK dari pemerintah	10
		- Kelompok bidang usaha tidak aktif	21
6.	Lain-lain	Gangguan satwa liar pada lahan garapan KTH	22

Sumber: Data Primer, 2025.

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle berdasarkan variabel perencanaan yaitu anggota kurang berperan aktif dalam penyusunan RKPS/RKT karena hanya pengurus inti saja yang menyusun, selain itu dalam RKPS belum terdapat data potensi jasa lingkungan yang ada di HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle sehingga dapat menghambat dalam kegiatan pengembangan jasa lingkungan yang ada. Faktor penghambat variabel keberhasilan kelembagaan yaitu masih kurangnya sumberdaya manusia yang dapat dijadikan sebagai regenerasi pengurus kelompok. Faktor penghambat variabel kewajiban lain yaitu masih kurangnya pengetahuan dalam hal penyusunan laporan kegiatan, selain itu pengurus maupun anggota hanya fokus pada pengelolaan lahan saja. Faktor penghambat variabel pemberdayaan masyarakat yaitu penyuluh jarang mengunjungi beberapa kelompok. Faktor penghambat variabel tata kelola usaha yaitu kurangnya pelatihan dari pemerintah dalam hal pengelolaan hasil hutan dan tidak ada dukungan pemasaran HHBK dari pemerintah. Serta faktor penghambat lainnya yaitu gangguan satwa liar.

Kurangnya sumberdaya manusia juga menyebabkan beberapa kewajiban lain seperti menyusun laporan kegiatan tahunan tidak dilaksanakan karena setiap anggota memang hanya fokus dalam mengelola kawasan saja tanpa memikirkan capaian-capaian yang telah diperoleh selama mengelola kawasan HKm menjadi sebuah laporan kegiatan tahunan.

**4. Kesimpulan**



Selama melaksanakan pengamatan di lapangan dan didukung dengan hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait, Penulis dapat menarik kesimpulan yaitu evaluasi pengelolaan hutan HKm Senggigi berdasarkan aspek tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha masuk dalam kriteria baik dengan nilai 392,39. Faktor pendukung pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle yang paling mendominasi adalah adanya Izin/Persetujuan PS dan sebagai sumber pendatan utama. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan HKm yang paling mendominasi antara lain tidak adanya dukungan pemerintah terkait pemasaran HHBK serta adanya gangguan satwa liar.

### Kontribusi Setiap Penulis

Dalam penulisan artikel ini, seluruh penulis memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan peran masing-masing:

- **Penulis Pertama (Teguh Bimantara):** Bertanggung jawab atas konsep dan desain penelitian, pengumpulan data primer, analisis awal, serta penulisan draf pertama artikel.
- **Penulis Kedua (Andi Khairil A. Samsu):** Berperan dalam pengolahan data dan validasi hasil, serta turut menyusun bagian metodologi dan membantu dalam revisi naskah.
- **Penulis Ketiga (Hasanuddin):** Melakukan telaah literatur, pengumpulan data primer, kontribusi dalam diskusi hasil penelitian, serta memberikan masukan substansial pada bagian pembahasan dan kesimpulan.

### Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi hasil atau interpretasi dari penelitian ini.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat dan Sekolah Rakyat Payo-Payo atas fasilitas dan bantuan teknis yang diberikan selama proses penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri., Wahyu Tri Widayanti., Bariatul Himmah., Ambar Astuti., Ratih Madya Septiana., Solehudin., Antonius Novenanto. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Montpellier, France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), dan Yogyakarta, Indonesia: PKHR Fakultas Kehutanan UGM.
- BPS, 2015. Nusa Tenggara Barat dalam Data. Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB.
- Cahyaningsih, Nurka., Gamal Pasya, Warsito. 2006. HKm Lampung Barat: Panduan Cara memproses Perijinan dan Kiat Sukses menghadapi Evaluasi. World Agroforestry Centre Asia Tenggara dan Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat.
- Departemen Kehutanan. 1992. Manual Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1999. Panduan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Jakarta: Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan.
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). Laporan Tahunan Program Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Toraja Utara. Makassar: Dishut Sulsel.
- Diniyati, Dian. 2015. Satwa Yang Sering ditemukan pada Hutan Rakyat Agroforestry di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Jurnal PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON Volume 1, Nomor 3, Juni 2015 ISSN: 2407-8050 Halaman: 642-646
- Djogo, Tony., Sunaryo., Didik Suharjito., Martua Sirait. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office. Bogor. Indonesia.
- FAO. (2020). Global Forest Resources Assessment 2020 – Main Report. Rome: Food and Agriculture Organization.
- GAPOKTAN MER TESARI, 2011. Rencana Umum Pengelolaan HKm Senggigi.

- Hakim I., S. Irawanti, Murniati, Sumarharni, A. Widiarti, R. Effendi, M. Muslich, Sri. Rulliaty. 2010. *Social Forestry: Menuju Masyarakat Sejahtera*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Ichsan, Andi Chairil., Bisrul Khofi, Almuarif Satria Putra, Christian Purba, Citra Hartati, Giorgio Budi Indrarto, Isnenti Apriani. 2014. *Laporan Assesment: Tata Kelola Kehutanan Di Kabupaten Lombok Barat*. Jaringan Tata Kelola Hutan. Bogor. Abbas, E. W., & Erlyani, N. (2020). *Menulis di Kala Badai Covid-19*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2015. *Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2016). *Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*.
- Markum, Budhy Setiawan, Rahmat Sabani. 2015. *Hutan Kemasyarakatan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera*. Mataram : RA Visindo.
- Maryudi, A., & Krott, M. (2012). "Poverty Alleviation Efforts through a Community Forestry Program in Java, Indonesia." *Journal of Sustainable Development*, 5(2), 43–53.
- Nandini, Ryke. 2013. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok*. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* Vol. 10 No. 1, Maret 2013: 43-55.
- Perum Perhutani. 2001. *Keputusan Direksi Perum Perhutani Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Perum Perhutani.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 *Tentang Perhutanan Sosial*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2007 *Tentang Hutan Kemasyarakatan*
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.57/Menhut-II/2014 *Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan*
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 *Tentang Hutan Kemasyarakatan*
- Puspita ID. 2006. *Motivasi Petani dan Peranan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) DI Desa Warnasari, BKPH Pangalengan KPH Bandung Selatan [Skripsi]* Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Rahmina, Yanti Sofia, Edy Marbyanto, Ali Mustofa. 2012. *Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-undang No. 41 Tahun 1999*. GIZ dan FORCLIME.
- Sanjaya, Rizki., Christine Wulandari., Susni Herawanti. 2017. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 5 No.2, April 2017 (30—42)
- Sari, D.A.P., & Nugroho, A. (2019). *Tata Kelola Usaha Hutan Kemasyarakatan dan Dampaknya terhadap Ekonomi Lokal*. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 11(2), 75–84.
- Siscawati, M., & Mahaningtyas, A. (2017). "Forest Tenure Reform in Indonesia: The Importance of Accountability and Gender Equality." *CIFOR Working Paper*.